

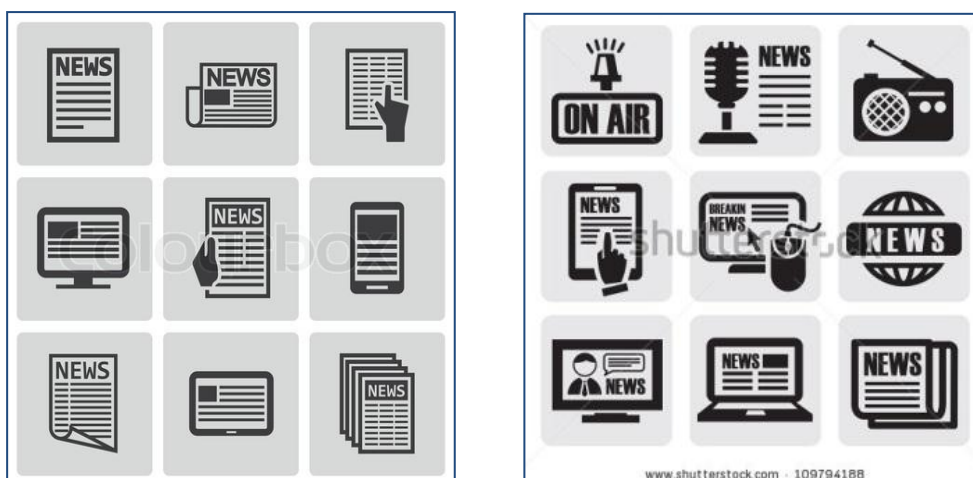


**Kementerian PPN/
Bappenas**

e-Newspaper Media Online

Politik

Rabu, 15 Oktober 2014



**Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Jakarta, Bappenas
2014**

Daftar Isi

1. TATA KELOLA DAERAH RENDAH (*Media Online Kompas*)
2. KEMENTERIAN KOORDINATOR HARUSNYA DIBAGI MENURUT PRIORITAS (*Media Online Indonesia Finance Today*)

Tata Kelola Daerah Rendah

Politik Dinasti dan Ketertutupan Jadi Penyebab

JAKARTA, KOMPAS — Politik dinasti dan ketertutupan daerah dalam mengelola anggaran dinilai menjadi penyebab rendahnya nilai indeks tata kelola atau Indonesia Governance Index di daerah. Untuk memperbaikinya, diperlukan tiga hal utama yang menjadi kunci. Selain transparansi dan akuntabilitas, juga partisipasi masyarakat.

Peneliti utama Indonesia Governance Index (IGI) Kemitraan, Lenny Hidayat, saat publikasi IGI di Jakarta, Selasa (14/10), mengatakan, politik dinasti inilah pada umumnya yang memperparah nilai indeks tata kelola karena sistemnya menjadi sangat tertutup.

"Daerah yang kepala daerah dan DPRD-nya masih berkeras membuat mekanisme pengawasan dan saling mengimbangi (*check and balances*) tak berjalan dan cenderung tak transparan," ujarnya pada acara yang dihadiri sejumlah pakar, kepala daerah, wakil pemerintah, dan kalangan masyarakat sipil tersebut.

Lenny kemudian mencontohkan fenomena di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yang memiliki APBD di atas Rp 2 triliun, tetapi tidak serta-merta mampu menyejahterakan rakyatnya karena tata kelola yang buruk. Indeks IGI Indramayu tercatat hanya 4,62, cukup jauh jika di-

bandingkan dengan Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang tercatat 6,85.

"Indramayu jadi daerah kedua penyumbang TKI terbesar walaupun posisi Indramayu berada di urutan ke-23 tata kelola IGI. Belanja aparaturnya mencapai 1,5 kali lipat dari anggaran program yang hanya Rp 699,2 miliar. Belanja aparaturnya tercatat Rp 1,3 triliun," kata Lenny. Padahal, jika dihitung, biaya satu orang anggota DPRD di Indramayu dapat membantu 116.037 orang miskin.

Jika dibandingkan dengan Gunung Kidul, yang APBD-nya termasuk rata-rata, Rp 700 miliar-Itu 800 miliar, ternyata tata kelolanya justru lebih baik. Penyebabnya, tidak ada politik dinasti. Bahkan, Gunung Kidul menempati urutan ketiga daerah yang tata kelolanya baik. "Ternyata tingginya APBD tak berkorelasi dengan baiknya tata kelola dan kesejahteraan," tutur

Lenny.

Dalam cutatan Kemitraan, nuansa dinasti yang menghancurkan tata kelola yang baik juga terjadi di beberapa kabupaten di Sulawesi Barat, di antaranya Mamuju, Mamasa, Polewali Mandar, Majene, Mamuju Utara, Kota Tanjung Pinang (Riau), dan Tangerang Selatan (Banten).

Oleh sebab itu, tambah Lenny, tiga hal utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, adalah kunci bagi daerah untuk bisa perbaikan rapor tata kelola. "Ketika ketiganya dibuka, baru bisa memberi sumbangsih pada kesejahteraan sosial dan efektivitas tata kelola. Jadi, buka dulu ketiga hal itu," ujarnya.

Dari empat aktor yang ada di daerah, Lenny menambihkan, rata-rata rapor paling rendah adalah pejabat politik. "Dari pejabat politik ini, paling rendah lagi adalah nilai untuk anggota DPRD," kata Lenny.

Yogyakarta tertinggi

Sementara itu, Direktur Eksekutif Kemitraan Wicaksono Saroso mengatakan, dari pengukuran IGI, tercatat Kota Yogyakarta menjadi daerah yang memiliki rapor tertinggi dalam indeks tata kelola daerah. Sebaliknya, Kabupaten Seluma, Bengkulu, menempati urutan terendah di antara 34 kabupaten/kota

INDEKS TATA KELOLA INDONESIA GOVERNANCE INDEX 2014



Sumber: Indonesia Governance Index (IGI) Kemitraan

yang dinilai Kemitraan.

Menurut Wicaksono, pada tahun 2014 IGI mengukur 34 kabupaten/kota di 33 provinsi dengan menggunakan 126 indikator yang bersumber dari 30 macam dokumen publik. Dua tahun lalu,

Kemitraan pernah merilis IGI untuk tingkat provinsi.

Sejauh ini, enam aktor di tiap daerah yang dinilai rapornya, selain kepala daerah dan DPRD, juga birokrasi serta masyarakat ekonomi dan sipil. (AMR)

Politik dinasti dan ketertutupan daerah dalam mengelola anggaran dinilai menjadi penyebab rendahnya nilai indeks tata kelola atau Indonesia Governance Index di daerah. Untuk memperbaikinya, diperlukan tiga hal utama yang menjadi kunci. Selain transparansi dan akuntabilitas, juga partisipasi masyarakat

Hashtag berita :

#SistemPolitikIndonesia #ReformasiBirokrasi #TransaksiAPBN #AparaturNegara

KEMENTERIAN KOORDINATOR HARUSNYA DIBAGI MENURUT PRIORITAS



subscribe dan download aplikasi Android & iOS di : www.ift.co.id

DECIDE NOW

Untuk berlangganan koran Indonesia Finance Today hubungi 021-700 95499



INDONESIA FINANCE TODAY

DECIDE NOW

Rabu, 15 Oktober 2014

Halaman 7, Kolom 1-5

Kementerian Koordinator Harusnya Dibagi Menurut Prioritas

Nurul Fitriany

JAKARTA - Core Indonesia mengusulkan Kementerian Koordinator dibagi berdasarkan prioritas tujuan pemerintah, bukan seperti saat ini berdasarkan Kementerian/Lembaga. Pasalnya, banyak pengembangan sektor yang membutuhkan koordinasi lintas K/L dan Kementerian Koordinator, sehingga koordinasi sulit dilakukan.

Hendri Sapri, Direktur Eksekutif Core Indonesia, mengatakan dua permasalahan utama pemerintahan saat ini, yaitu perencanaan yang tidak baik dan tidak efektifnya kinerja Kementerian Perekonomian. Hendri menilai dalam dua kali Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) perencanaan pembangunan dan komprehensif pembangunan tidak terlihat. Hendri juga melihat pembagian Kementerian Koordinator, tidak tepat.

Alasannya, permasalahan ekonomi dan target pembangunan yang direncanakan tidak bisa dibagi dalam tiga Kementerian Koordinator, karena banyak program yang harus dilakukan lintas kementerian yang berada dalam satu Kementerian Perekonomian. Hendri memberikan contoh masalah upah tenaga kerja yang masuk di Kementerian Koordinator Bidang Sosial, padahal upah buruh merupakan bagian dari daya saing industri.

Hendri mengusulkan pembagian Kementerian Koordinator ke depan tidak lagi berdasarkan Kementerian/Lembaga, namun lebih ke prioritas pembangunan, sehingga semua Kementerian Perekono-

mian membawahi Kementerian/Lembaga.

"Dalam pembangunan selama lima tahun, pilihlah prioritas pembangunan. Mau ada empat prioritas, misalnya maritim, pertanian, energi tapi itu harus satu gugus tersendiri, gugus inilah yang akan dipimpin oleh seorang Kementerian Perekonomi, jadi Menkopya tidak dibagi atas kementerian tapi dibagi atas prioritas pembangunan selama lima tahun. Inilah yang akan memudahkan koordinasi," terangnya.

Selain itu, Hendri menyarankan agar Kementerian Kelautan atau Kementerian Maritim dihapuskan karena sektor ini sulit, sangat lintas kementerian, mulai dari kementerian di bidang ekonomi seperti perindustrian, perdagangan hingga kementerian pariwisata dan budaya, bahkan kementerian pendidikan. Langkah ini akan mempermudah koordinasi dan pengembangan sektor maritim yang selama ini masih sangat tertinggal.

Untuk mendorong pengembangan sektor maritim, menurut Hendri, perlu peranan pemerintah dari sisi kebijakan dan anggaran. Dari sisi anggaran pemerintah perlu mengalokasikan dana lebih dan siap menurunkan pendapatan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendorong infrastruktur sektor maritim.

"Pemerintah bisa memerintahkan BUMN yang terkait untuk membangun infrastruktur maritim, dengan membiarkan keuntungannya untuk kembali jadi modal usaha sehingga dividen yang disetor ke



Pemerintah baru diharapkan membagi kementerian koordinator berdasarkan prioritas pembangunan lima tahun ke depan agar lebih efektif dalam berkoordinasi.

FOTO: PUSKAL

pemerintah akan lebih rendah," katanya.

Selain itu, pemerintah juga harus siap mengalokasikan dana APBN lebih besar ke wilayah timur yang merupakan basis maritim. Paradigma juga harus diubah, menjadi pengembangan maritim untuk meningkatkan konektivitas global.

Sementara itu Muhammad Faisal, Peneliti Senior Core, mengatakan empat hal yang harus ditingkatkan untuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Pertama,

pengintegrasian pembangunan seluruh komponen di dalam sektor kelautan. Kedua, pengintegrasian pengembangan industri besar dengan usaha rakyat (nelayan). Ketiga, pembenahan infrastruktur kelautan untuk kelancaran distribusi hasil-hasil laut maupun untuk pengamanan sumber daya laut dari pencurian asing. Keempat, peningkatan akses terhadap sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan bagi tenaga kerja.

Menurut dia, pengembangan sektor kelautan cukup besar karena

dengan luas wilayah perairan yang mencapai 5,8 juta km2 atau 75% dari wilayah Indonesia sumbangan terhadap produk domestik bruto hanya 3% pada 2013.

Sementara tingkat penyerapan tenaga kerja sektor kelautan hanya 1% dari total tenaga kerja Indonesia. Dari sisi ekspor Indonesia masih menempati posisi ke 12 padahal garis pantai Indonesia terpanjang ke dua di dunia. "Sektor ini masih dapat dikembangkan karena selama ini dinilai masih digarap separuh-separuh," terangnya. ■

Presiden terpilih mengusulkan Kementerian Koordinator dibagi berdasarkan prioritas tujuan pemerintah

Hashtag Berita :

#TransisiPemerintah

#PresidenTerpilih

#RencanaKerjaPemerintah

#RPJMN

#Kementerian/Lembaga